

## Daftar Pustaka

### Buku-Buku

A.Josias Simon R-Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung.

C.Djisman Somisr, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Jakarta, Nuansa Aulia.

C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Kencana Media Group.

C.S.I. Kansi, SH.,MH, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Dr. Andi Hamzah SH dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Drs. Adani Chazawi SH, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta,

Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Prof. Barda Nawawi Arief SH, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rhineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1999, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press.

Sigit Suseno, 2012, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Di Luar Kuhp*, Jakarta,

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barhatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Tongat SH.,Mhum, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*, Malang, UMM Pres.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

### **Website**

Di akses di <http://www.merdeka.com/peristiwa/napi-korupsi-rusli-zainal-malah-diusulkan-dapat-remisi.html> pada tanggal 26 september 2015 pada pukul 20.00 WIB

Di akses di <http://politik.rmol.co/read/2015/08/25/214682/Johan-Budi-Tak-Sependapat-dengan-Menkumham-Soal-Remisi-Koruptor-> pada tanggal 26 september 2015 pada pukul 20.30 WIB

Di akses di <http://www.antikorupsi.org/id/content/berikan-remisi-koruptor-menkum-ham-tabrak-aturan-pp-992012> pada tanggal 26 September 2015 pada pukul 20.31 WIB

Di akses di <http://liseyolanda.staff.uui.ac.id/2009/08/26/tujuan-hukum-pidana/> Pada tanggal 24 februari 2016 pukul 13.51 WIB

Di akses di <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html> pada tanggal 31 januari 2016 pukul 20.46 WIB

<http://news.okezone.com/read/2015/08/17/337/1197405/remisi-dasawarsa-menkumham-potong-hukuman-1-938-koruptor> diakses 20 februari 2016 pukul 19.38 WIB

[file:///C:/Users/Personal/20Co/Documents/Kumpulan/20CONTOH/20SKRIPSI/pembahasan/20rumusan\(d\).html](file:///C:/Users/Personal/20Co/Documents/Kumpulan/20CONTOH/20SKRIPSI/pembahasan/20rumusan(d).html) Diakses 26 februari 2016 pukul 09.53 WIB

<http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/05/teori-teori-pemidanaan-dalam-hukum.html> diakses 24 februari 2016 pukul 20.06 WIB